



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Tata Air, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tata Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Tata Air digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Tata Air.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Tata Air dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
- a. Dinas Tata Air;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Tata Air.

- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tata Air sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Air setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tata Air secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Tata Air dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016

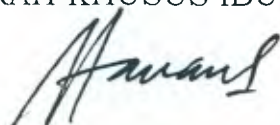
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62052

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran = Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2016
Tanggal 31 Maret 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS TATA AIR

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|--|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | | | | |
| 2. | Sekretaris Dinas | | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Umum | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | | |
| | 2) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Umum | | | | 5 | | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 3 | | | | | |
| | 5) Pengendali Pemeliharaan Bangunan Gedung Tata Air | | | | 2 | | | | | |
| | 6) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | | |
| | 7) Caraka | | | | 1 | | | | | |
| | b. Kepala Subbagian Kepegawaian | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | | | | |
| | 2) Pengolah Kepegawaian | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Kepegawaian | | | | 3 | | | | | |
| | c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran | | | | 3 | | | | | |
| | 2) Pengolah Data Anggaran | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | | |
| | d. Kepala Subbagian Keuangan | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 7 | | | | | |
| | 2) Verifikator Keuangan | | | | 3 | | | | | |
| | 3) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Data Keuangan | | | | 2 | | | | | |
| | 5) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | | |
| 3. | Kepala Bidang Air Limbah/Air Kotor | | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Analisis Perencanaan dan Pengembangan Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|--|--|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2) Pengolah Perencanaan dan Pengembangan Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Pengembangan Air Limbah/Air Kotor | | | | 1 | | | | | |
| | 4) Caraka | | | | 1 | | | | | |
| | b. Kepala Seksi Pembangunan Air Limbah/Air Kotor | | | | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan Air Limbah /Air Kotor | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | 1 | | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Air Limbah/Air Kotor | | | | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan dan Pengawasan Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan dan Pengawasan Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pemeliharaan dan Pengawasan Air Limbah/Air Kotor | | | | 1 | | | | | |
| | 4) Caraka | | | | 1 | | | | | |
| 4 | Kepala Bidang Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah dan Air | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Analisis Perencanaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah dan Air | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengolah Perencanaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah dan Air | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | | |
| | b. Kepala Seksi Pengendalian Air Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengendali Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengolah Pemeliharaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pemeliharaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | | |
| 5 | Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat | | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Barat | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Analisis Perencanaan Sistem Aliran Barat | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Barat | | | | 3 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Barat | | | | 1 | | | | | |
| | b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Barat | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan Sistem Aliran Barat | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan Sistem Aliran Barat | | | | 4 | | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan Sistem Aliran Barat | | | | 1 | | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Aliran Barat | | | 1 | | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Aliran Barat | | | | 2 | | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Aliran Barat | | | | 3 | | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENCAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 3) Koordinator Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Barat | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Barat | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa Sistem Aliran Barat | | | | 72 | | | 13 PNS dan 59 NON PNS | |
| | 6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Barat | | | | 25 | | | 17 PNS dan 8 NON PNS | |
| 6 | Kepala Bidang Sungai dan Pantau Sistem Aliran Tengah | 1 | | | | | | | |
| | a Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Tengah | | | 1 | | | | | |
| | 1) Analis Perencanaan Sistem Aliran Tengah | | | | 3 | | | | |
| | 2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Tengah | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Tengah | | | | 1 | | | | |
| | b Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Tengah | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan Sistem Aliran Tengah | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan Sistem Aliran Tengah | | | | 4 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan Sistem Aliran Tengah | | | | 1 | | | | |
| | 4) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah | | | | 3 | | | | |
| | 3) Koordinator Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Tengah | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa Sistem Aliran Tengah | | | | 88 | | | 22 PNS dan 66 NON PNS | |
| | 6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Tengah | | | | 59 | | | 28 PNS dan 31 NON PNS | |
| 7 | Kepala Bidang Sungai dan Pantau Sistem Aliran Timur | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Timur | | | 1 | | | | | |
| | 1) Analis Perencanaan Sistem Aliran Timur | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Timur | | | | 3 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Timur | | | | 1 | | | | |
| | b Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Timur | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan Sistem Aliran Timur | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan Sistem Aliran Timur | | | | 4 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan Sistem Aliran Timur | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Aliran Timur | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Aliran Timur | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Aliran Timur | | | | 3 | | | | |
| | 3) Koordinator Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Timur | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Timur | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa Sistem Aliran Timur | | | | 80 | | | 24 PNS dan 56 NON PNS | |
| | 6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Timur | | | | 9 | | | 6 PNS dan 3 NON PNS | |
| 8 | Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 | | | | | | | |
| | a Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | KETERANGAN |
|----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | |
| | 4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | |
| | b. Kepala Seksi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | | | | |
| | 1) Pengelola Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | |
| | d. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 1 | | | |
| | e. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendalian Banjir | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 3) Koordinator Pemeliharaan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 1 | | | |
| | 5) Operator Pompa / Pintu Air Sistem Pengendalian Banjir | | | | 74 | | 20 PNS dan 54 NON PNS | |
| | f. Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan (8 Kecamatan) | | | 8 | | | | |
| | 1) Pengendali Sarana dan Prasarana Pengairan | | | | 8 | | | |
| | 2) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengairan | | | | 8 | | | |
| | 3) Penyiap Berkas | | | | 2 | | | |
| | 4) Caraka | | | | 1 | | | |
| 9. | Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara | | 1 | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | |
| | 4) Pengelola Program dan Anggaran | | | | 1 | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | KETERANGAN |
|----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | 7 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | |
| | 9) Caraka | | | | 1 | | | |
| | b. Kepala Seksi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah/Air Kotor | | | | 1 | | | |
| | c. Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | |
| | d. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian | | | | 1 | | | |
| | 4) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | |
| | e. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | |
| | 3) Koordinator Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 1 | | | |
| | 5) Operator Pompa / Pmtu Air Sistem Pengendali Banjir | | | | 123 | | 30 PNS dan 93 NON PNS | |
| | f. Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan (6 Kecamatan) | | | 6 | | | | |
| | 1) Pengendali Sarana dan Prasarana Pengaturan | | | | 6 | | | |
| | 2) Pengadministrasi | | | | 6 | | | |
| | 3) Penyiap Berkas | | | | 3 | | | |
| | 4) Caraka | | | | 3 | | | |
| 10 | Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat | | 1 | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | |
| | 4) Pengelola Program dan Anggaran | | | | 1 | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | |
| | b. Kepala Seksi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah/Air Kotor | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | 1 | | | | |
| | 1) Pengelola Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | |
| | 4) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | |
| | d. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian | | | | 1 | | | | |
| | 4) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | |
| | e. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Koordinator Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa / Pintu Air Sistem Pengendali Banjir | | | | 1 | | | | |
| | f. Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan (8 Kecamatan) | | | 8 | 225 | | | 35 PNS dan 190 NON PNS | |
| | 1) Pengendali Sarana dan Prasarana Pengairan | | | | 8 | | | | |
| | 2) Pengadministrasi | | | | 8 | | | | |
| | 3) Penyiap Berkas | | | | 3 | | | | |
| | 4) Catraka | | | | 1 | | | | |
| 11 | Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 1 | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Pengelola Program dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| | b. Kepala Seksi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah/Air Kotor | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah/Air Kotor | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | |
| | d Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian | | | 1 | | | | | |
| | e Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Koordinator Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa / Pintu Air Sistem Pengendali Banjir | | | | 173 | | | | |
| | f Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan (10 Kecamatan) | | | 10 | | | | 35 PNS dan 1 PNS | |
| | 1) Pengendali Sarana dan Prasarana Pengaturan | | | | 10 | | | | |
| | 2) Pengadministrasi | | | | 10 | | | | |
| | 3) Penyiap Berkas | | | | 1 | | | | |
| | 4) Caraka | | | | 2 | | | | |
| 12. | Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur | | 1 | | | | | | |
| | a Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Pengelola Program dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 2 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpunan | | | | 1 | | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| | b Kepala Seksi Air Limbah/Air Kotor | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Air Limbah / Air Kotor | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah / Air Kotor | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah / Air Kotor | | | 1 | | | | | |
| | c Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan/Air Baku | | | | 1 | | | | |
| | d Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir | | | | 1 | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | e Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | 1 | | | | | |
| | 1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 3) Koordinator Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 2 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir | | | | 1 | | | | |
| | 5) Operator Pompa/Pintu Air Sistem Pengendali Banjir | | | | 122 | | | 30 PNS dan 92 NON PNS | |
| | f Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan (10 Kecamatan) | | | 10 | | | | | |
| | 1) Pengendali Sarana dan Prasarana Pengauran | | | | 10 | | | | |
| | 2) Pengadministrasi | | | | 10 | | | | |
| 13. | Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 1 | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 5) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengolah Data Keuangan | | | | 1 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| | 8) Pengadministrasi Umum | | | | 1 | | | | |
| | b. Kepala Seksi Air Limbah, Bawah Tanah dan Air Bersih | | | | | | | | |
| | 1) Pengolah Air Limbah, Air Bawah Tanah dan Air Bersih | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengendali Air Limbah, Air Bawah Tanah dan Air Bersih | | | | 1 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Air Limbah, Air Bawah Tanah dan Air Bersih | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Seksi Pantai | | | | | | | | |
| | 1) Pengolah Seksi Pantai | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengendali Seksi Pantai | | | | 1 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Seksi Pantai | | | | 1 | | | | |
| 14. | Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan | | 1 | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Peralatan | | | | | | | | |
| | 1) Pengolah Peralatan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengawas Sarana dan Prasarana Peralatan | | | | 2 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Peralatan | | | | 2 | | | | |
| | | | | | 1 | | | | |

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 4) Teknisi Alat Berat | | | | 3 | | | | |
| | 5) Operator Alat Berat | | | | 5 | | | | |
| | 6) Pengemudi | | | | 2 | | | | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Perbekalan | | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengolah Perbekalan | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengadministrasi Perbekalan | | | | 1 | | | | |
| | 3) Teknisi Alat Berat | | | | 3 | | | | |
| | 4) Pengemudi | | | | 1 | | | | |
| 15 | Kepala Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian | 1 | | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | 1 | | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| | 8) Caraka | | | | 1 | | | | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian | | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengolah Penyelidikan dan Pengujian | | | | 2 | | | | |
| | 2) Koordinator Penyelidikan dan Pengujian | | | | 3 | | | | |
| | 3) Pengadministrasi Penyelidikan dan Pengujian | | | | 1 | | | | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pengukuran | | | | 1 | | | | |
| | 1) Perancang Gambar | | | | 2 | | | | |
| | 2) Pengolah Pengukuran | | | | 5 | | | | |
| | 3) Koordinator Pengukuran | | | | 5 | | | | |
| | 4) Pengadministrasi Pengukuran | | | | 1 | | | | |
| 16 | Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Tata Air | | 1 | | | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | | |
| | 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| | 2) Pengelola/Pengurus Barang | | | | 1 | | | | |
| | 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| | 4) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| | 5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| | 6) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| | 7) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data | | | | 1 | | | | |
| | 1) Pengolah Data Informasi Tata Air | | | | 5 | | | | |
| | 2) Pengadministrasi Informasi Data Tata Air | | | | 1 | | | | |

| NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | | | KETERANGAN |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|---|------------|
| | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| c. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi | | | | 1 | | | | |
| 1) Pengolah Sistem Informasi | | | | 10 | | | | |
| 2) Teknisi Jaringan | | | | 1 | | | | |
| 3) Pengadministrasi Sistem Informasi | | | | 1 | | | | |
| Kepala Unit Pengadaan Tanah | | 1 | | | | | | |
| a. Kepala Subbagian Tata Usaha | | | 1 | | | | | |
| 1) Bendaharawan | | | | 1 | | | | |
| 2) Pengelola/Pengumis Barang | | | | 1 | | | | |
| 3) Penyimpan Barang | | | | 1 | | | | |
| 4) Verifikator | | | | 1 | | | | |
| 5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran | | | | 1 | | | | |
| 6) Pengadministrasi Pimpinan | | | | 1 | | | | |
| 7) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | | | |
| 8) Caraka | | | | 1 | | | | |
| b. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I | | | | 1 | | | | |
| 1) Pengolah Wilayah I | | | | 3 | | | | |
| 2) Pengadministrasi Wilayah I | | | | 1 | | | | |
| c. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah II | | | | 1 | | | | |
| 1) Pengolah Wilayah II | | | | 3 | | | | |
| 2) Pengadministrasi Wilayah II | | | | 1 | | | | |
| Jumlah | 1 | 16 | 93 | 1577 | 0 | | | |
| Jumlah Total | | | | 1687 | | | | |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA